

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah karya bersama yang berlangsung dalam suatu pola kehidupan insani tertentu. Pada hakikatnya pendidikan itu terjadi di keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga baik pemerintah maupun swasta yang bersifat formal atau disebut pendidikan formal dan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah atau pendidikan informal. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pendidikan formal, menurut *Webster's New Dictionary* yang dikutip oleh Syaiful Sagala (2013, hlm.1), pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya lewat khususnya lewat pendidikan formal.

Dictionary of education mendefinisikan pendidikan sebagai (1) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat; (2) proses social yang menyediakan lingkungan yang terpilih dan terkontrol untuk mengembangkan kemampuan social dan individual secara optimal (Dadang Suhardan dkk, 2014, hlm.87)

Pendidikan telah mulai dilaksanakan sejak manusia hadir di muka bumi ini dalam bentuk pemberian warisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari orangtua dalam mempersiapkan anak-anaknya menghadapi kehidupan dan masa depannya. Pendidikan bukanlah semata-mata merupakan upaya menyiapkan individu untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, melainkan lebih diarahkan pada upaya pembentukan dan kesediaan melestarikan lingkungan dalam jalinan yang selaras.

Jika dicermati dengan sungguh-sungguh khususnya kualitas, maka pendidikan tidak akan habis meskipun dipakai oleh orang banyak, jika jumlah pemakainya melebihi batas ambang, maka akan berpengaruh pada kualitasnya. Sebagai bentuk jasa, pengadaannya memerlukan pendanaan, dan besarnya biaya yang ada juga menentukan mutu pendidikan yang dapat disediakan bagi masyarakat (*public*). Dengan demikian semua pihak yang ingin mendapatkan jasa pendidikan yang wajar,

mereka juga harus berperan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan tersebut (Fuad Hasan dalam Syaiful Sagala, 2013 hlm.3).

Perubahan paradigma dari sentralistik ke desentralistik membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan gagal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat.

Permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata. *Faktor pertama*, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan *education production function atau input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang, kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. *Faktor ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (Diknas dalam Siti Irene Astuti, 2015, hlm.12-13).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945”. Proses dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sadar dan sistematis oleh pendidik dan peserta didik, pemerintah, dan masyarakat luas. Usaha itu berupa kegiatan dan proses yang terjadi dalam hubungan interaktif belajar mengajar antara guru dan siswa yang difasilitasi oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat (Syaiful Sagala, 2013, hlm.21)

Konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) digulirkan bersamaan dengan bergulirnya tema besar dalam kerangka reformasi dan demokratisasi pendidikan, yaitu pada tahun 1999. Secara konseptual, manajemen berbasis sekolah (MBS) dipahami sebagai salah satu alternative pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan (A. Malik Fajar dalam Abu-Duhou, 2002, hlm.16)

Selanjutnya menurut E. Mulyasa (2014, hlm.24) manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Dengan definisi ini, maka sekolah harus diberi otonomi dan keluwesan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya pendidikan di sekolahnya. Mengingat manajemen berbasis sekolah memberikan otonomi besar, maka sekolah harus lebih mandiri. Dengan kemandirian ini, maka sekolah harus melibatkan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya karena ketergantungan terhadap pemerintah mulai berkurang.

Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam implementasinya, manajemen berbasis sekolah harus didukung oleh peran serta masyarakat dan orangtua peserta didik yang tinggi. Orangtua siswa dan masyarakat tidak hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah, orangtua dan masyarakat merumuskan dan mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 20 tahun 2003, memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok,

keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan mutu layanan pendidikan.

Peran serta masyarakat dan orang tua di sekitarnya sangat penting. Di satu sisi sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di lain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika orang tua dan masyarakat dapat saling melengkapi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.

Agar semua terpelihara dan berjalan dengan baik, maka harus ada komunikasi timbal balik antara sekolah dengan semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat setempat dan orang tua murid, sehingga sekolah, masyarakat dan orang tua merupakan satu kesatuan yang utuh dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu di sekolah.

Hal ini tercantum dalam keputusan menteri pendidikan nasional (kepmendiknas) nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
- b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah dewan pendidikan dan komite sekolah yang mandiri.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah dipandang perlu menetapkan keputusan menteri pendidikan nasional tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.

Hal ini dipertegas pula dalam undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 54 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Sekolah adalah bagian integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan sekolah dan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan, masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat membutuhkannya.

Kenyataan di lapangan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SLB Negeri Bekasi Jaya sudah di terapkan namun belum efektif secara keseluruhan. Namun demikian, sekolah sudah mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi sekolah, program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan belajar anak dalam proses belajar mengajar, dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan sekolah, baik menyangkut program, anggaran, ketenagaan dan prestasi. Peran orangtua belum sepenuhnya terlibat dalam proses pendidikan, keterlibatan masih terbatas pada dukungan dana. Bahkan ada kecenderungan yang masih kuat bahwa keterbatasan orangtua dalam memberikan waktu untuk mendampingi belajar anak rata-rata disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kemampuan pengetahuan. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan MBS dirasa penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, semakin baik kualitas masyarakat maka akan semakin baik pula kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dengan ikut berperan sertanya orangtua dalam pelaksanaan MBS maka potensi yang di miliki anak dapat semakin berkembang.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian dan mengetahui lebih jauh hal tersebut melalui penelitian yang berjudul **“PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN**

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SLB NEGERI BEKASI JAYA BEKASI “ .

B. Fokus Masalah Penelitian

Fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang ada di SLB Negeri Bekasi Jaya”. Fokus masalah tersebut dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SLB Negeri Bekasi Jaya?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) di SLB Negeri Bekasi Jaya?
3. Bagaimanakah hambatan yang di alami dalam mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS)?
4. Upaya apakah yang dilakukan sekolah dalam menanggulangi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan MBS di SLB Negeri Bekasi Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang ada di SLB Negeri Bekasi Jaya. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan (MBS) di SLB Negeri Bekasi Jaya.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SLB Negeri Bekasi Jaya.
3. Mengetahui hambatan yang di alami sekolah dalam mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS).
4. Mengetahui upaya yang dilakukan sekolah dalam menanggulangi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) di SLB Negeri Bekasi Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmiah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama bagi guru, siswa yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar.

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan, yakni:

- a. Sebagai penambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan MBS di sekolah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah.
- c. Bagi orangtua siswa, sebagai bahan pertimbangan untuk ikut berpartisipasi aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah guna meningkatkan mutu pendidikan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Agar pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka pembahasan ini peneliti susun menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah berisi tentang alasan mengapa peneliti melakukan penelitian terkait peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SLB Negeri Bekasi Jaya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Fokus masalah berisi tentang masalah yang diteliti oleh penulis, yang selanjutnya diuraikan dalam pertanyaan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan penelitian ini dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi menggambarkan bagaimana struktur yang ditulis dalam skripsi ini

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Berisi tentang konsep manajemen berbasis sekolah, pengertian manajemen berbasis sekolah, tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah, karakteristik manajemen berbasis sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah, implementasi manajemen berbasis sekolah di SLB.

B. Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Berisi tentang pengetahuan peran serta masyarakat, landasan hukum peran serta masyarakat dalam pendidikan, bentuk peran serta masyarakat, upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berisi penjelasan mengenai desain penelitian.

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

Berisi penjelasan tentang lokasi dimana penelitian dilakukan, serta siapa saja subjek yang diteliti.

C. Pengumpulan Data

Berisi penjelasan tentang bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, meliputi wawancara, observasi dan analisis dokumen

D. Instrumen Penelitian

Berisi penjelasan mengenai instrumen penelitian yang digunakan, meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman analisis dokumen.

E. Teknik Analisis Data

Berisi penjelasan bagaimana analisis data dilakukan oleh peneliti, yang meliputi proses reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Fisik Sekolah

Berisi uraian tentang latar fisik sekolah.

B. Hasil Penelitian

Berisi uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. Pembahasan

Berisi uraian tentang hasil penelitian yang dihubungkan dengan teori yang ada.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

B. Saran

Berisi saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.